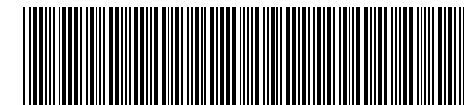




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.477250/2025**



DS:7800-6143-2088-6334

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09

Tanggal : 14 November 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
- Sebesar : Rp. 70.390.000 (TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 70.390.000
Rp. 70.390.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	70.390.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 70.390.000

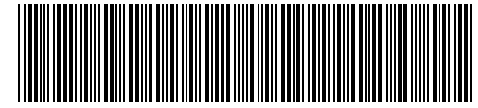
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Halaman : I A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70.390.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	70.390.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	: 2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 3. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
	: 4. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	: 5. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 6. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
	: 7. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	: 8. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 9. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 10. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 11. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	: 12. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	: 13. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	: 14. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	: 15. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	: 16. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	: 17. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	: 18. 14	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
	: 19. 15	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	750.000
Rincian Output		:	01	AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2,00	kegiatan	750.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	45,00	Perkara, Berkas Perkara	32.920.000
Rincian Output		:	01	BCA.U08 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	45,00	Perkara	32.920.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	103,00	Orang	36.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	103,00	Orang	36.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	3,00	Perkara, Berkas Perkara	720.000
Rincian Output		:	01	QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3,00	Perkara	720.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025

I B. SUMBER DANA



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	70.390.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	70.390.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



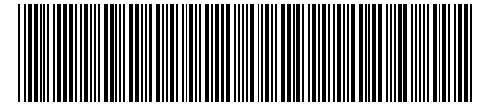
DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	-	70.390	-	-	-	70.390		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	70.390	-	-	-	70.390		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	70.390	-	-	-	70.390		
1049.AEA	Koordinasi (24.14 NUSA TENGGARA TIMUR / KAB. ROTE NDAO)	-	750	-	-	-	750	24 . 14	
01	RM	-	750	-	-	-	750	039	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (24.14 NUSA TENGGARA TIMUR / KAB. ROTE NDAO)	-	32.920	-	-	-	32.920	24 . 14	
01	RM	-	32.920	-	-	-	32.920	039	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (24.14 NUSA TENGGARA TIMUR / KAB. ROTE NDAO)	-	36.000	-	-	-	36.000	24 . 14	
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	039	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (24.14 NUSA TENGGARA TIMUR / KAB. ROTE NDAO)	-	720	-	-	-	720	24 . 14	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	720	-	-	-	720	039@	
JUMLAH		-	70.390	-	-	-	70.390		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (477250) PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	3.750	5.877	6.523	7.514	8.105	7.270	6.666	6.378	6.278	4.893	7.136	70.390
		BELANJA BARANG	0	3.750	5.877	6.523	7.514	8.105	7.270	6.666	6.378	6.278	4.893	7.136	70.390
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	3.750	5.877	6.523	7.514	8.105	7.270	6.666	6.378	6.278	4.893	7.136	70.390
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	3.750	5.877	6.523	7.514	8.105	7.270	6.666	6.378	6.278	4.893	7.136	70.390
		PERKIRAAN PENERIMAAN	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	981	11.651
		- PNB (425232)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	43	450
		- PNB (425233)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860
		- PNB (425239)	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	783	9.341

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [477250] PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

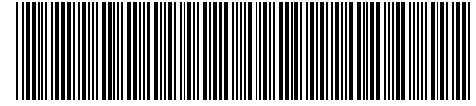
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.		120
	52 Belanja Barang	Rp.		120
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		120
	PMK Nomor 56 tahun 2025			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.477250/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7800-6143-2088-6334

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [477250] PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

tt.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002